

TANTANGAN & MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (INDONESIA)

Pendahuluan

- a. Apakah pendidikan Indonesia ?
- b. Apakah pendidikan milik (orang) Indonesia ?
- c. Apakah pendidikan sebagaimana ditetapkan perundang-undangan?
- d. Apakah pendidikan yang berlangsung di bumi Indonesia ?
- e. Apakah ada dan manakah peran pendidikan dalam pembangunan kehidupan bangsa selama ini ?
- f. Bagaimanakah pendidikan selama ini dikelola ?

Tantangan Berat: Sistem Sosial Kita Terkoyak

- a. Globalisasi (rasionalisme, liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, dan hedonisme yang disertai permisifisme).
- b. Pendidikan sebagai paradigma pembangunan bangsa belum menjelaskan.
 - Berlaku paradigma ekonomi, politik, dan keamanan.
 - Moralitas dikesampingkan.
 - *Indigenous process* tidak terjadi.
- c. Harapan dan tuntutan masyarakat makin meningkat di satu pihak, biaya pendidikan makin mahal di pihak lain.
- d. Pemerintahan multi-partai mempengaruhi gonjang-ganjing kebijakan pembangunan dan pendidikan.
- e. Liberalisasi proyek inovasi pendidikan.
- f. Revolusi informasi dan teknologi tidak selalu berpengaruh positif.

Masalah Strategis Pendidikan: Sekolah-Sekolah Kita Oleng!

- a. Pendidikan saat ini tiada berjiwa (tanpa roh), semacam kehilangan filosofi sehingga salah arah.
- b. Kebijakan belum komposit dan konsisten. Uniformitas dan padat beban ketimbang diversitas dan berkesan ramping.
- c. Standarisasi pendidikan belum disertai akses politik yang memadai. Pendidikan menjadi kapitalistik bahkan sebagai *hamba* politik.
- d. Relevansi pendidikan amat terbatas. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak cocok dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Saat ini, didengungkan *life skills* bukan *menthal skills*.
- e. Mutu pendidikan lemah, baik input, proses dan out-putnya belum dibangun dan diusahakan secara sungguh-sungguh. Inputnya minimum, prosesnya kurang menarik/ menjemukan dan hasilnya rendah.
- f. Ragu akan desentralisasi dan otonomi: peluang dan perimbangan telah dipersepsi tetapi debirokratisasi manajemen pendidikan terlalu cepat digulirkan.
- g. Partisipasi (kontrol) rakyat atas penyelenggaraan pembangunan (pendidikan) belum memadai.
- h. Anggaran belum memadai dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.
- i. Sumber daya daerah beragam, tetapi sumber daya manusia belum mencukupi.

Masalah teknis penyelenggaraan:

- a. *Misinterpretation*
- b. *Mismanagement*
- c. *Miscommunication*
- d. *Wrong investment.*

USAHA-USAHA (PERANAN) ADMINISTRASI PENDIDIKAN

- Perumusan visi Pendidikan Indonesia sewajarnya menopang perubahan menuju Indonesia baru laksana *mozaik* kehidupan, berkilau dinamis dan kompetitif, berwarna-warni, kultural, transaktif dan interpretif.
- Misi Pendidikan Indonesia adalah mengembangkan *sistem atau mozaik* pendidikan yang berorientasi pada kemandirian dan tuntutan pasar bebas untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara proporsional dalam dunia internasional.
- Pendidikan Indonesia itu bukanlah suatu uniformitas melainkan menyangkut masalah pilihan nilai-nilai dasar dan moral untuk setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat (agama, budaya, etnis, kelas sosial dan kombinasinya), dan pilihan negara itu sendiri. **Mungkinan ada semacam de-konstruksi epistemologis untuk mengklarifikasi friksi-friksi tingkat ideologis ?**
- Demokratisasi pendidikan bukan sekedar masalah pemerataan (wajar dikdas) tetapi masalah mutu. Masalah demokratisasi pendidikan sebenarnya merentang mulai dari perumusan kebijakan, implementasi dan manajemen, anggaran, kesejahteraan hingga masalah pembelajaran.
 - Sekalipun mau dinyatakan sebagai suatu sistem (karena masalah politik), Pendidikan Indonesia tidaklah dapat dijelaskan batas-batasnya secara tegas sehingga keutuhan sistemnya bersifat hipotetik dan paradigma pengelolaannya bersifat *emergent*.
 - Berdasar asumsi dan kondisi pemikiran itu, maka melecut suatu persaingan yang amat ketat di antara *stakeholders* atau kelompok masyarakat; dan hal ini terasa mengemuka manakala legitimasi atau kebijakan di bidang pendidikan hendak dibuat.

- ❑ Mengembangkan relevansi pendidikan secara memadai dengan mengembangkan *life skills* sekaligus *menthal skills* pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- ❑ Membina sistem akuntabilitas (publik) untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan sekaligus membina kejujuran dan transparansi.
- ❑ Manajemen pendidikan yang berorientasi perubahan dan mutu secara menyeluruh.
- ❑ Mengembangkan profesionalisme untuk menyiapkan aparatur (tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya) yang kompeten dan profesional.
- ❑ Menata kesungguhan pengelolaan pendidikan secara desentralistis dan membina otonomi tanpa harus memperdaya masyarakat.
- ❑ Memberanikan penetapan anggaran pendidikan yang memadai dan pengelolaannya secara efisien.

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN

- ❑ Pengertian administrasi pendidikan tidak sederhana.
- ❑ Administrasi pendidikan bertugas menetapkan tujuan, membuat keputusan atau kebijakan, memenej organisasi dan menentukan peranan-peranan, mengkoordinasikan fungsi-fungsi, menaksir efektivitas, mengembangkan kepemimpinan, memberdayakan sumber-sumber, membina komunikasi, mengendalikan mutu, melakukan perubahan dan inovasi serta membina budaya organisasi.
- ❑ Administrasi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana orang-orang melakukan kerjasama mulai dari menentukan tujuan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi hingga tercapainya tujuan itu secara efektif, efisien, rasional dan adil.
- ❑ Administrasi pendidikan sering dipertukarkan konsepnya dengan manajemen pendidikan.

PERKEMBANGAN STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Studi administrasi pendidikan berakar sejak lama, mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teori organisasi mulai periode klasik hingga periode kultural atau budaya. Prepper (1995: 110) menggambarkan perkembangan itu ke dalam pemahaman budaya kerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel
The Development of the Organization Culture Vision of Organizing

Machine Culture.	Satisfaction culture.	Teamwork culture.	Organismic culture.	Organization as culture.
Classical period.	Human relations period.	Human resources period.	Systems period.	Culture period.
1900-Present.	1930s-Present.	1960s-Present.	1960s-Present.	1980s-Present.
Mechanical vision of workplace.	Parent-Child vision of workplace.	Participatory vision of workplace.	Interdependent subgroups vision of the workplace	Symbolic vision of the workplace
Culture imposed from the top down.	Culture imposed from the top down.	Top and bottom jointly create culture	Subcultural complexity variable to be managed.	Culture is what the organization is, not some-thing imposed
Identifiers such as division, efficiency, hierarchy, control, structure.	Identifiers such as feelings, needs, esteem, benevolence, concern.	Identifiers such as contributions, participation, enrichment, contingencies.	Identifiers such as complexity, variables, interdependence, environments, feedback.	Identifiers such as values, beliefs, symbols, subgroups, communities.
Culture should be controlled.	Culturee should be taught.	Culture can be developed and managed	Culture is a variable to be controlled.	Culture can be described, probably not controlled.
Driven by desire for efficiency.	Driven by desire for workplace harmony.	Driven by the recognition of environmental complexity.	Driven by the recognition of environmental complexity.	Driven by the recognition of the importance of symbols.

Bandung, 2 Februari 2010.

Dr. H. Johar Permana, M.A.

---o0o---